

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam proses pembangunan, setiap Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan yang matang untuk mengevaluasi perkembangan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah membentuk perangkat daerah yang bertugas membantu serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintahan. Seiring dengan meningkatnya pembangunan daerah di sektor ekonomi, permintaan serta berbagai indikator yang membutuhkan data perencanaan dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota pun turut meningkat. Hal ini bertujuan untuk mendukung strategi perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 dimana RPJP yang ditetapkan melalui Undang-Undang ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diperlukan suatu bentuk Perencanaan Pembangunan Nasional jangka panjang yang menjadi arah dan prioritas pembangunan yang menyeluruh untuk dijadikan sebagai panduan utama Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara inklusif oleh seluruh elemen bangsa.

RKPD adalah penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, yang berisi rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaannya, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu, penetapan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Kepala Daerah dan DPRD didasarkan pada RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati kemudian menjadi dasar dalam proses penyusunan APBD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 mengenai susunan perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah. Bappeda memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan serta menilai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Sebagai lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan, Bappeda dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, Bupati, atau Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk berdasarkan kebutuhan, perkembangan, dan kemajuan di bidang pemerintahan untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan,

khususnya di sektor pemerintahan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta mencapai visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, Bappeda terus berupaya meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang andal. Bappeda juga berkomitmen menjadi organisasi pembelajaran (learning organization) yang mengarah pada penerapan Good Governance dan Clean Government.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam “Perencanaan Penyusunan RKPD oleh Bapped Provinsi Sumatera Barat”, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan dan penyusunan RKPD oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyusunan RKPD oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang di ambil penulis, maka tujuan dalam penulisan ini adalah :

1. Menganalisis proses perencanaan dan penyusunan RKPD oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat guna memahami tahapan, mekanisme, serta kebijakan yang diterapkan dalam perencanaannya.

2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penyusunan RKPD serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
3. Menggali peran Bappeda sebagai koordinator dalam penyusunan RKPD, termasuk koordinasi dengan berbagai sektor dan pemangku kepentingan guna memastikan sinergi dalam perencanaan pembangunan.

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat magang ini diharapkan dapat bisa memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah wawasan dan pemahaman mengenai proses perencanaan dan penyusunan RKPD oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat serta peran strategisnya dalam pembangunan daerah.
 - b. Mengembangkan kemampuan analisis dalam mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penyusunan RKPD serta mencari solusi yang efektif untuk mengatasinya.
 - c. Memahami konsep perencanaan pembangunan daerah serta keterkaitannya dengan kebijakan nasional dan daerah, yang dapat menjadi bekal bagi penulis dalam bidang akademik maupun profesional.

- d. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pembangunan, baik secara teoritis maupun praktis, yang dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Pada penyusunan Tugas Akhir Penulis menerapkan berbagai metode untuk dipakai dalam menentukan informasi yang kaitannya terhadap judul pokok bahasanya, berikut metode yang digunakan antara lain :

- a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang penulis lakukan adalah dengan membaca, mencari, dan mengumpulkan bahan dari buku yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas penulis.

- b. Penelitian Lapangan

Peninjauan langsung dengan mendatangi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan data yang diperlukan serta memahami tujuan penulisan, maka dilakukanlah pelaksanaan kegiatan magang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- c. Pencarian Data Melalui Internet

Data dapat dicari dari internet dengan melakukan pencarian berbagai bahan pendukung yang lain dengan adanya situs yang berkaitan.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan waktu magang ini berlangsung selama 40 hari kerja.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi yang tertera pada laporan tugas akhir ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematis penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode pengumpulan data, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini penulis menguraikan landasan teori yang dipakai dalam studi dan pembahasan apa saja yang bersangkutan dengan perencanaan penyusunan RKPD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat.

BAB III : Gambaran Umum Instansi

Bab ini terdiri dari gambaran umum mengenai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat yang mencakup gambaran umum wilayah Sumatera Barat,

gambaran umum wilayah Sumatera Barat, gambaran umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat, serta visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penulisan yang membahas data dari informasi penelitian, di analisis, ditafsirkan sehingga kita dapat mengetahui bagaimana hasil penelitian apakah dapat menjawab permasalahan dalam pembahasan landasan teori yang sebelumnya dijelaskan.

BAB V : Penutup

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan-kesimpulan atas pembahasan dari penulisan ini, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran sebagai sumbangan penulisan pendapat yang mungkin bermanfaat dalam peningkatan kinerja terhadap Provinsi Sumatera Barat.